



## **BAB. II PERENCANAAN KINERJA**

# BAB II

## PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021

### 2.2 Perjanjian Kilnerja

### 2.1 Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang di susun dengan mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih. Visi pembangunan daerah Kota Magelang tahun 2016-2021 merupakan visi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dengan rumusan sebagai berikut: **"MAGELANG SEBAGAI KOTA JASA YANG MODERN DAN CERDAS DILANDASI MASYARAKAT SEJAHTERA DAN RELIGIUS"**.

Visi Pembangunan Kota Magelang ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kota Magelang dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Visi ini harus dapat diukur keberhasilannya dalam rangka mewujudkan Magelang sebagai kota jasa yang modern dan cerdas sekaligus masyarakat yang sejahtera dan religius. Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

#### 1. Kota Jasa yang Modern dan Cerdas

Pembangunan Kota Magelang diarahkan untuk memperkuat sektor jasa yang didominasi oleh jasa pemerintahan umum dan jasa swasta sebagai potensi kota, dengan menitikberatkan pada sektor perekonomian, sektor kesehatan, dan sektor pendidikan.

**Modern** adalah sikap dan cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntunan jaman, yang berarti suatu kondisi lebih maju daripada daerah lain, mampu berdaya saing dengan daerah lain menggunakan potensi yang ada. Kota modern adalah kota yang mampu menyelaraskan sosial, fisik, dan ekonomi dengan budaya dan sejarah yang dimiliki oleh kota tersebut, dengan karakteristik:

- a) Masyarakat sejahtera dalam financial;
- b) Kota terdepan dalam pelayanan, yaitu kota modern harus bisa menyediakan pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan para pengguna kota atau masyarakat umum;
- c) Visual kota mengundang pesona, dalam arti bahwa kota modern harus dapat dilihat dari fisiknya, secara visual kota terlihat tertata, menarik, mengundang kenyamanan untuk tinggal dan berkarya.

**Kota cerdas** adalah kota yang dikelola secara efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada warganya secara adil tanpa diskriminasi dengan muatan kemudahan koneksitas informasi dan komunikasi berbasis teknologi informasi yang dilakukan dalam dunia usaha, sistem penyelenggaraan pelayanan publik, mekanisme partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, kontrol, maupun komplain, dan bidang lain pendukung nilai daya saing daerah.

Unsur-unsur Kota Cerdas meliputi:

- a) *Smart Governance* yaitu: pengembangan *e-governance*, ada partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan;
- b) *Smart infrastructure* yaitu: pengembangan jaringan IT, pengembangan sistem informasi manajemen berbasis IT;
- c) *Smart Economy*, yaitu : pengembangan *city branding*, pengembangan kewirausahaan, pengembangan *e-commerce*, dan ekonomi kreatif;
- d) *Smart environment* yaitu: pengelolaan lingkungan berbasis IT, pengelolaan SDA berbasis IT, serta pemanfaatan sumber energi terbarukan;
- e) *Smart people* yaitu: pendidikan dan pengembangan SDM yang melek teknologi, dan dukungan penelitian, pengembangan karakter sosial budaya masyarakat; serta
- f) *Smart Living* yaitu: kemudahan akses terhadap layanan pendidikan, kemudahan akses terhadap layanan kesehatan, pengembangan peran media, dan kemudahan akses terhadap jaminan keamanan.

Dalam mewujudkan kota cerdas, ke-enam komponen tersebut diatas, yang juga bisa dikemas dalam 3 (tiga) aspek utama yaitu *smart economy*, *smart social* dan *smart environment*, juga diperhatikan 3 komponen yang menjadikan mampu membangun kota cerdas (enabler), yaitu sumber daya manusia, dukungan teknologi informasi dan komunikasi serta tata kelola.

## 2. Sejahtera

Perwujudan kota sejahtera dicapai melalui peningkatan dan pemantapan upaya menyejahterakan masyarakat secara adil merata tanpa diskriminasi melalui:

- a) Optimalisasi peran dan fungsi lembaga pemerintah, swasta, masyarakat madani, dan media massa khususnya dalam pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan;
- b) Menciptakan peluang kerja dalam bidang pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan;
- c) Tanpa mengabaikan pembangunan dibidang lain sebagai upaya menuju masyarakat yang berdaya dan mandiri.

### 3. Religius

Masyarakat religius adalah masyarakat yang menerapkan ketaqwaan kepada ketuhanannya dalam tata kehidupan sehari-hari sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Dalam masyarakat religius dijamin kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya, dan kecukupan ketersediaan tempat ibadah.

Untuk mencapai visi tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih modern serta ramah lingkungan.
3. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
4. Mengembangkan potensi budaya dan kesenian daerah sebagai landasan pengembangan dan pembangunan pariwisata Kota Magelang.
5. Memperkuat kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan dan peningkatan sarana-prasarana peribadatan sebagai landasan terbangunnya masyarakat madani.

Berdasarkan hasil telaahan telaah Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih tahun 2016-2021, dan dilandasi komitmen Bappeda Kota Magelang untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi Walikota Magelang, maka dalam rumusan tujuan dan sasaran akan menjadi landasan penyusunan arsitektur kinerja Bappeda dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Sedangkan terkait bagaimana pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilihat dari rumusan strategi dan kebijakan.

#### **a. Tujuan Jangka Menengah Bappeda Kota Magelang Tahun 2016-2021**

Tujuan yang ingin dicapai dalam Renstra BAPPEDA Kota Magelang tahun 2016-2021 antara lain:

1. Meningkatkan kapasitas dan pemerataan kualitas aparatur perencanaan.
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dalam mendukung core business perencanaan
3. Meningkatkan koordinasi internal, tata kelola, administrasi dan pelaporan yang tertib dan sesuai dengan aturan yang berlaku

4. Mengoptimalkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
5. Mewujudkan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan
6. Mewujudkan dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan bidang perencanaan, bidang ekonomi dan prasarana wilayah, dan bidang pemerintahan dan sosial budaya yang berkualitas
7. Mewujudkan pengendalian kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas
8. Meningkatkan kinerja monitoring evaluasi kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah

#### **b. Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kota Magelang Tahun 2016-2021**

Guna mewujudkan tujuan jangka menengah di atas, maka sasaran-sasaran yang hendak dituju BAPPEDA Kota Magelang Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran untuk mewujudkan *tujuan pertama*, Meningkatkan kapasitas dan pemerataan kualitas aparatur perencanaan adalah Meningkatnya kapasitas dan makin meratanya aparatur perencanaan
2. Sasaran untuk mewujudkan tujuan kedua Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dalam mendukung core business perencanaan adalah Tersedianya sarpras yang berkualitas
3. Sasaran untuk mewujudkan *tujuan ketiga*, Meningkatkan koordinasi internal, tata kelola, administrasi dan pelaporan yang tertib dan sesuai dengan aturan yang berlaku adalah Terwujudnya administrasi dan pelaporan yang tertib sesuai peraturan yang berlaku .
4. Untuk mewujudkan *tujuan keempat*, Mengoptimalkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan sasaran :
  - a) Meningkatnya kualitas perencanaan dan mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif dan inovatif
  - b) Terwujudnya dukungan data dan informasi terupdate
  - c) Terintegrasinya sistem informasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi pembangunan
5. Untuk mewujudkan *tujuan ke lima*, Mewujudkan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan dengan sasaran Terwujudnya konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan

6. Untuk mewujudkan *tujuan ke enam*, Mewujudkan dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasana dan bidang sosial budaya yang berkualitas dengan sasaran :
  - a) Terwujudnya ketersediaan dokumen perencanaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi yang berkualitas.
  - b) Terwujudnya ketersediaan dokumen perencanaan dan terimplementasinya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Fisik Prasarana yang berkualitas
  - c) Terwujudnya ketersediaan dokumen perencanaan dan terimplementasinya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Sosial Budaya yang berkualitas
7. Untuk mewujudkan *tujuan ke tujuh*, Mewujudkan pengendalian kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dengan sasaran :
  - a) Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang Perencanaan
  - b) Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah;
  - c) Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya
8. Untuk mewujudkan *tujuan ke delapan*, Mewujudkan pengendalian kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dengan sasaran :
  - a) Meningkatnya kualitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan RKPD dan RPJM
  - b) Meningkatnya kualitas kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi perencanaan bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah;
  - c) Meningkatnya kualitas kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi perencanaan bidang Pemerintahan, Sosial Budaya

### **c. Strategi dan Kebijakan Bappeda Kota Magelang Tahun 2016-2021**

Strategi merupakan langkah-langkah yang diambil untuk mencapai tujuan pelayanan OPD, sedang Kebijakan merupakan arah tindakan yang diambil OPD untuk menentukan program-program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Dalam menentukan arah yang diambil Bappeda Kota Magelang dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan perlu dirumuskan ke dalam kebijakan. Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk

mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/ kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

Menurut targetnya, kebijakan terdiri atas: (i) Kebijakan internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan, dan (ii) Kebijakan eksternal, yaitu kebijakan yang diterbitkan OPD dalam rangka mengatur dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Perumusan kebijakan yang menjadi jembatan penghubung antara visi-misi Bappeda Kota Magelang dengan rincian program dan kegiatan sebagaimana tabel berikut:

**TABEL 2.1 KETERKAITAN ANTARA TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN dan PROGRAM/KEGIATAN**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Meningkatkan kapasitas dan pemerataan kualitas aparatur perencanaan	Meningkatnya kapasitas dan makin meratanya aparatur perencanaan	1. Meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya aparatur perencanaan Bappeda melalui bintek, diklat, pendidikan formal perencanaan serta kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi	1. Memfasilitasi aparatur perencanaan untuk mengikuti pendidikan formal perencanaan, bintek, seminar, diklat workshop terkait dengan perencanaan 2. Melaksanakan fasilitasi bagi aparatur perencana dan karyawan untuk mengikuti bintek, seminar, diklat, workshop, konsultasi dan koordinasi terkait dengan teknis pekerjaan
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dalam mendukung <i>core business</i> perencanaan	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.	1. Meningkatkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada, struktur organisasi dengan jumlah staf yang cukup dengan kompetensi pendidikan yang memadai dalam rangka mendukung peningkatan kinerja lembaga perencanaan. 2. Pengembangan sistem informasi perencanaan dan data base perencanaan berbasis teknologi informatika	1. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor serta kegiatan pemeliharaan aset kantor yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas fungsi Bappeda 2. Pengembangan fitur fitur SIPPD serta website Bappeda
3. Meningkatkan koordinasi internal, tata kelola, administrasi dan pelaporan yang tertib dan sesuai dengan aturan yang berlaku	Terwujudnya administrasi dan pelaporan yang tertib sesuai peraturan yang berlaku.	1. Penyediaan dan implementasi <i>Standart Operating Procedure</i> (SOP) dalam optimalisasi kinerja Perencanaan 2. Peningkatan pengelolaan administrasi, data dan kearsipan yang di dukung dengan sarana prasarana yang cukup dan staf	1. Melaksanakan pengelolaan administrasi 2. Melaksanakan pengelolaan dan tertib administrasi arsip serta manajemen aset OPD 3. Melaksanakan pengembangan capaian kinerja kegiatan dan kinerja keuangan OPD secara tertib, lancar ,tepat waktu



Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		<p>dengan kompetensi pendidikan yang memadai untuk mendukung kegiatan perencanaan</p> <p>3. Mengelola anggaran dengan lebih efisien, efektif dan akuntabilitas dengan memperjelas arah kebijakan organisasi dalam penggunaan anggaran</p>	
4. Mengoptimalkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	a. Meningkatnya kualitas perencanaan dan mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif dan inovatif	<p>1. Optimalisasi aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan</p> <p>2. Meningkatkan fasilitasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah</p> <p>3. Peningkatan komitmen dan konsistensi pemerintah untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan</p>	Penyelenggaraan sistem Perencanaan Pembangunan daerah yang partisipatif, akuntabel dan transparan, dalam mewujudkan dokumen RKPD yang berkualitas

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	b. Terwujudnya dukungan data dan informasi ter-update	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas dan dukungan data informasi serta kearsipan bagi penguatan penyusunan perencanaan pembangunan</li> <li>2. Peningkatan pemanfaatan teknologi informatika sebagai sumber data dan informasi dalam rangka mendukung penyusunan produk - produk perencanaan serta publikasi informasi dan produk perencanaan pembangunan sehingga lebih mudah di akses oleh masyarakat dan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan</li> </ol>	<p>Penyusunan data daerah sebagai bahan analisa perencanaan dan pengambilan kebijakan</p> <p>Publikasi proses dan hasil perencanaan pembangunan melalui webiste bappeda</p>
5. Mewujudkan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	Terwujudnya konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan berkeadilan</li> </ol>	Penyusunan dokumen tahunan yang konsisten dengan dokumen jangka menengah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
6. Mewujudkan dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasarana dan bidang sosial budaya yang berkualitas	Terwujudnya ketersediaan dokumen perencanaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi yang berkualitas	Meningkatkan kualitas produk dan dokumen - dokumen perencanaan yang di dukung dengan kerjasama antar lembaga perencanaan baik propinsi maupun pusat dan kerjasama dengan perguruan tinggi dan swasta	Penyusunan Dokumen perencanaan bidang ekonomi yang relevan untuk menjawab berbagai permasalahan dan isu bidang ekonomi pada skala kota
	Terwujudnya ketersediaan dokumen perencanaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang fisik dan prasarana yang berkualitas	Meningkatkan kualitas produk dan dokumen-dokumen perencanaan yang di dukung dengan kerjasama antar lembaga perencanaan baik propinsi maupun pusat dan kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi	Penyusunan Dokumen perencanaan bidang Fisik prasarana yang relevan untuk menjawab berbagai permasalahan dan isu bidang fisik dan prasarana pada skala kota
	Terwujudnya ketersediaan dokumen perencanaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang sosial budaya yang berkualitas	Meningkatkan kualitas produk dan dokumen-dokumen perencanaan yang di dukung dengan kerjasama antar lembaga perencanaan baik propinsi maupun pusat dan kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi	Penyusunan Dokumen perencanaan bidang fisik prasarana yang relevan untuk menjawab berbagai permasalahan dan isu bidang fisik dan prasarana pada skala kota
7. Mewujudkan koordinasi, pengendalian kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang Ekonomi FisprWil	Meningkatkan koordinasi dalam menyusun dan menerapkan kebijakan dan program terkait dengan penanganan permasalahan - permasalahan di bidang ekonomi fisprawil dan bidang sosial budaya secara komprehensif dan integral	Melakukan koordinasi perencanaan pembangunan bidang Ekonomi dan fisik Prasarana Wilayah di Kota Magelang yang meliputi urusan di bawah koordinasi bidang ekonomi Prasarana Wilayah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang Sosial Budaya		Melakukan koordinasi perencanaan pembangunan bidang Sosial Budaya di Kota Magelang sesuai urusan di bawah kewenangan koordinasi bidang sosial budaya
8.Meningkatkan kinerja monitoring evaluasi kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas monitoring dan evaluasi RKPD dan RPJM	Meningkatkan kualitas kajian dan evaluasi kebijakan pembangunan sebagai bahan dalam proses perencanaan pembangunan, penyusunan kebijakan di berbagai bidang dan pencapaian tujuan sasaran dalam RPJMD	Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
	<p>Meningkatnya kualitas monitoring dan evaluasi perencanaan bidang Ekonomi Fisik Prasarana Wilayah</p> <p>Meningkatnya monitoring dan evaluasi perencanaan bidang Sosial Budaya</p>	Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan	<p>Melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan bidang ekonomi Prasarana Wilayah</p> <p>Melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan bidang sosial budaya</p>

## 2.2 Perjanjian Kinerja

Dasar pengukuran kinerja yang dipergunakan pada tahun 2017 adalah Perjanjian Kinerja yang telah di sempurnakan dengan Revisi Perjanjian Kinerja tahun 2017. Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2017 merupakan tahun pertama pelaksanaan baik dalam RPJMD maupun Renstra Perangkat Daerah.

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang merupakan pernyataan komitmen Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kepada Walikota Magelang mengenai target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2017. Adapun Target Kinerja yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2017 selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2017**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
<b>MISI I :</b> <i>Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat</i>				
1	Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel	a. Persentasi capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra, Renja	Prosentase	90%
		b. Persentase Publikasi data dan statistik sektoral yang di manfaatkan dalam perencanaan pembangunan	Prosentase	60%
2	Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan	a. Prosentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD	Prosentase	60%
		b. Cakupan PD yang mempunyai mitra dengan forum warga	Prosentase	58.62%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
3	Mengoptimalkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Cakupan kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif	Prosentase	51.25%
4	Mewujudkan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	Cakupan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	Prosentase	100%
5	Mewujudkan dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasarana dan bidang sosial budaya yang berkualitas	Cakupan ketersediaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasarana dan bidang sosial budaya yang berkualitas	Prosentase	70%

Target kinerja dalam dokumen Perjanjian Kinerja merupakan indikator yang tercantum dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang menjadi indikator Kinerja utama yang akan di capai di dalam rentang perencanaan. Indikator di dalam Perjanjian Kinerja ini selaras dengan indikator dalam RPJMD Kota Magelang. Sehingga tingkat pencapaian target kinerja dalam dokumen Perjanjian Kinerja mencerminkan pencapaian target indikator kinerja dalam Renstra dan RPJMD.

Melalui perjanjian kinerja akan terwujud komitmen dari penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak di batasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun – tahun sebelumnya. Sehingga dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun – tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya

Untuk mencapai indikator kinerja sasaran tersebut, indikator kinerja program yang mendukung sebagaimana tersaji dalam tabel 2.3 berikut.:

**Tabel 2.3 Indikator Kinerja Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2017**

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6
<b>MISI I :</b> Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat					
1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD	a. Rasio aparatur perencanaan dengan latar belakang pendidikan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• S1</li> <li>• S2</li> <li>• S3</li> </ul> b. Rasio aparatur perencanaan yang mengikuti pelatihan perencanaan dan penganggaran           c. Cakupan seminar/ workshop /pelatihan yang diselenggarakan Bappeda	%          %   %	47% 34% 0% 87% 95%	Rp. 202.292.000,-
2	Pengembangan Data/Informasi	Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/ Jumlah data yang dibutuhkan	%	90%	Rp.97.164.000,-
3	Kerjasama Pembangunan	Jumlah kerjasama (MOU) yang ditindaklanjuti	jumlah	2	Rp.226.313.000,-
4	Perencanaan Pembangunan Daerah	a. Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	%	100%	Rp.1.609.319.000,-
		b. Persentase pokok pikiran DPRD yang diakomodir	%	70%	
		c. Persentase BA Hasil Musrenbang yang terakomodir	%	77%	

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6
		d. Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Konsultasi Publik	%	35%	
		e. Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir	%	76%	
5	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang ekonomi	%	100%	Rp. 642.691.000,-
6	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial Budaya	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang sosial budaya	%	100%	Rp. 907.466.000,-
7	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Fisik Prasarana	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang Fisik Prasarana	%	100%	Rp. 1.037.454.000,-

#### ❖ Rencana Penganggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Di tahun 2017 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota melaksanakan 11 Program dan 69 kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**  
**Kota Magelang Tahun 2017**

No	Kode	Nama SKPD / Urusan / Program / Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan (Rp)
	<b>2.18.4.03.01.16</b>	<b>Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah</b>	<b>14.160.000,-</b>
1	2.18.4.03.01.16.02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	14.160.000,-
	<b>4.03.4.03.01.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>709.088.000,-</b>
2	4.03.4.03.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	685.000,-



No	Kode	Nama SKPD / Urusan / Program / Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan (Rp)
3	4.03.4.03.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	96.600.000,-
4	4.03.4.03.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	8.590.000,-
5	4.03.4.03.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	129.462.000,-
6	4.03.4.03.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	65.778.000,-
7	4.03.4.03.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	16.268.000,-
8	4.03.4.03.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	34.844.000,-
9	4.03.4.03.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.000.000,-
10	4.03.4.03.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6.720.000,-
11	4.03.4.03.01.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	1.450.000,-
12	4.03.4.03.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	31.746.000,-
13	4.03.4.03.01.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	245.900.000,-
14	4.03.4.03.01.01.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	66.045.000,-
	<b>4.03.4.03.01.02</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>1.362.161.000,-</b>
15	4.03.4.03.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	613.400.000,-
16	4.03.4.03.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	82.350.000,-
17	4.03.4.03.01.02.10	Pengadaan mebeleur	90.400.000,-
18	4.03.4.03.01.02.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	315.950.000,-
19	4.03.4.03.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	166.620.000,-
20	4.03.4.03.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	17.176.000,-
21	4.03.4.03.01.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	71.265.000,-
22	4.03.4.03.01.02.27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	5.000.000,-
	<b>4.03.4.03.01.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD</b>	<b>202.292.000,-</b>
23	4.03.4.03.01.05.07	Workshop perencanaan pembangunan daerah	78.042.000,-
24	4.03.4.03.01.05.08	Sosialisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	124.250.000,-

No	Kode	Nama SKPD / Urusan / Program / Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan (Rp)
	<b>4.03.4.03.01.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>75.201.000,-</b>
25	4.03.4.03.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	15.512.000,-
26	4.03.4.03.01.06.03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	8.550.000,-
27	4.03.4.03.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	9.165.000,-
28	4.03.4.03.01.06.06	Penyusunan Rencana Kerja OPD	11.122.000,-
29	4.03.4.03.01.06.08	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	17.593.000,-
30	4.03.4.03.01.06.10	Penyusunan Rencana Strategis OPD	7.404.000,-
31	4.03.4.03.01.06.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	5.855.000,-
	<b>4.03.4.03.01.15</b>	<b>Program Pengembangan data/informasi</b>	<b>97.164.000,-</b>
32	4.03.4.03.01.15.05	Penyusunan Profile Daerah	97.164.000,-
	<b>4.03.4.03.01.16</b>	<b>Program Kerjasama Pembangunan</b>	<b>226.313.000,-</b>
33	4.03.4.03.01.16.07	Fasilitasi FEDEP	226.313.000,-
	<b>4.03.4.03.01.21</b>	<b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>1.609.319.000,-</b>
34	4.03.4.03.01.21.08	Penyusunan rancangan RKPD	302.504.000,-
35	4.03.4.03.01.21.09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	136.500.000,-
36	4.03.4.03.01.21.10	Penetapan RKPD	34.855.000,-
37	4.03.4.03.01.21.13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	17.671.000,-
38	4.03.4.03.01.21.14	Forum OPD dan FGD	139.620.000,-
39	4.03.4.03.01.21.19	Publikasi Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah	50.500.000,-
40	4.03.4.03.01.21.31	Pelaksanaan Verifikasi Renja OPD	96.120.000,-
41	4.03.4.03.01.21.35	Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD	128.595.000,-
42	4.03.4.03.01.21.36	Penetapan Perubahan RKPD	29.305.000,-
43	4.03.4.03.01.21.37	Pelaksanaan Verifikasi Perubahan Renja OPD	92.579.000,-
44	4.03.4.03.01.21.39	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Sejuta Bunga	149.753.000,-
45	4.03.4.03.01.21.42	Pengendalian dan Evaluasi RKPD	46.625.000,-

No	Kode	Nama SKPD / Urusan / Program / Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan (Rp)
46	4.03.4.03.01.21.63	Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)	132.618.000,-
47	4.03.4.03.01.21.64	Penyusunan Standar Satuan Harga	156.875.000,-
48	4.03.4.03.01.21.66	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Smart City	95.199.000,-
	<b>4.03.4.03.01.22</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi</b>	<b>642.691.000,-</b>
49	4.03.4.03.01.22.40	Penyusunan Dokumen Pengembangan Pertanian Organik	150.300.000,-
50	4.03.4.03.01.22.41	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Rumah Potong Hewan (RPH) Ber-NKV	153.405.000,-
51	4.03.4.03.01.22.45	Pemetaan Potensi Ekonomi Kota Magelang	99.755.000,-
52	4.03.4.03.01.22.46	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Jangkauan Pemasaran dalam Skema E-Commerce	118.365.000,-
53	4.03.4.03.01.22.47	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	120.866.000,-
	<b>4.03.4.03.01.23</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya</b>	<b>907.466.000,-</b>
54	4.03.4.03.01.23.09	Penyusunan Laporan Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD)	155.035.000,-
55	4.03.4.03.01.23.19	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pendidikan Untuk Semua (PUS)	103.986.000,-
56	4.03.4.03.01.23.25	Penyusunan Dokumen Perencanaan Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY)	100.718.000,-
57	4.03.4.03.01.23.30	Penyusunan Masterplan Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan	192.739.000,-
58	4.03.4.03.01.23.32	Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	110.856.000,-
59	4.03.4.03.01.23.37	Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender	102.705.000,-
60	4.03.4.03.01.23.38	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	30.984.000,-
61	4.03.4.03.01.23.39	Penyusunan Dokumen Kemitraan	110.443.000,-
	<b>4.03.4.03.01.26</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana</b>	<b>1.037.454.000,-</b>
62	4.03.4.03.01.26.13	Penyusunan Blueprint Universal Design	185.000.000,-
63	4.03.4.03.01.26.14	Review Strategi Sanitasi Kota	241.122.000,-

No	Kode	Nama SKPD / Urusan / Program / Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan (Rp)
64	4.03.4.03.01.26.15	Penyusunan Dokumen Visualisasi Kawasan Strategis dan Prioritas Daerah	68.895.000,-
65	4.03.4.03.01.26.16	Penyusunan Dokumen Rencana Pemanfaatan Lahan dan Bangunan Eks Magelang Theatre	139.900.000,-
66	4.03.4.03.01.26.17	Pembaruan Data Dasar Usulan Keciaptakaryaan	96.897.000,-
67	4.03.4.03.01.26.18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Dampak Lingkungan TPST 3R Induk	105.420.000,-
68	4.03.4.03.01.26.19	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Bangunan TPST 3R Induk	107.120.000,-
69	4.03.4.03.01.26.20	Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan TPST 3R Induk	93.100.000,-
<b>TOTAL</b>			<b>6.883.309.000,-</b>